



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DEDE SOBARI**
2. Jabatan : **PANITERA PENGGANTI**
3. NHK : **481525**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 841.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 64 m2/80 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 52 m2/52 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/120 m2 di BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 55.000.000
5. Tanah Seluas 2360 m2 di BANDUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.000.000
6. Tanah Seluas 224 m2 di BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 50.000.000
7. Tanah Seluas 1719 m2 di CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 27 m2/27 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 93.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, SUZUKI AVP Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	347.768.549
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.282.268.549
III. HUTANG	Rp.	90.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.192.268.549

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.